

RENCANA AKSI KEGIATAN

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I MANADO

2025 – 2029



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, atas Berkat dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi Kegiatan BKK Kelas I Manado ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan manajemen pelaksanaan program penanggulangan penyakit di wilayah kerja dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan, pemantauan dan pelaporan.

Dalam Rencana Aksi Kegiatan BKK Kelas I Manado untuk tahun 2025-2029, kami kedepan akan menyempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dukungan manajemen. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK BKK Kelas I Manado tahun 2025-2029 dapat dijadikan dasar dan acuan oleh seluruh Substansi dan Sub. Bag. ADUM yang ada di wilayah kerja dalam melaksanakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas manajemen program Penanggulangan Penyakit. Diharapkan Rencana Aksi Kegiatan tahun 2025-2029 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025-2029 ini, semoga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di wilayah Kerja BKK Kelas I Mando.

Manado, Januari 2025

Kepala



dr. Pingkan M. Pijoh.,MPHM
NIP. 197102082001122003

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Kondisi Umum | 1 |
| B. Potensi dan Tantangan..... | 3 |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi | 4 |
| | |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS | 5 |
| A. Visi dan Misi | 5 |
| B. Tujuan Strategis | 6 |
| C. Sasaran Strategis | 7 |
| D. Indikator Kinerja | 8 |
| E. Arah Kebijakan dan Strategis | 10 |
| | |
| BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN | 13 |
| A. Kerangka Logis..... | 13 |
| B. Rencana Kegiatan | 15 |
| C. Kerangka Kelembagaan | 17 |
| D. Kerangka Regulasi | 18 |
| E. Kerangka Pendanaan | 19 |
| | |
| BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM | 21 |
| A. Pemantauan | 21 |
| B. Evaluasi..... | 21 |
| C. Pengendalian | 21 |
| | |
| BAB VI PENUTUP | 22 |
| A. Lampiran 1. Kerangka Logis Program..... | 22 |
| B. Lampiran 2. Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan..... | 23 |
| C. Lampiran 3. Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber Data | 24 |
| D. Lampiran 4. Matriks Strategi Pencapaian Program..... | 26 |

DAFTAR TABEL

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Target Kinerja..... | 15 |
| Tabel 2. Kerangka Pendanaan..... | 19 |
| Tabel 3. Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan | 23 |
| Tabel 4. Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber Data | 24 |
| Tabel 5. Matriks Strategi Pencapaian Program | 26 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum.

Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Manado 2025-2029 merupakan Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado Tahun 2025– 2029 dengan beberapa perubahan-perubahan skala prioritas sasaran, peningkatan kemampuan, aksesibilitas, dan percepatan terhadap beberapa sasaran program.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2016/2024 Tentang wilayah kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan kesehatan memiliki 10 wilayah kerja yaitu: Kantor Induk, Bandara Sam Ratulangi, Wilker Pelabuhan Laut Manado, Wilker Pelabuhan Laut Likupang, Wilker Pelabuhan Laut Siau, Wilker Pelabuhan Laut Tahuna, Wilker Pelabuhan Laut Petta, Wilker Pelabuhan Laut Melonguane, Wilker Pelabuhan Laut Lirung, Wilker Pelabuhan Laut Marore dan Wilker Pelabuhan Laut Miangas.

Pembangunan kesehatan juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado memiliki SDM sebanyak 94 (Sembilan Puluh Empat) orang pada Tahun 2025 dengan rincian 73 (Tujuh Puluh Tiga) orang ASN dan 21 (dua puluh satu) orang tenaga Non ASN. Jika dilihat dari jenis kelamin maka terdapat 49 (Empat Puluh Sembilan) orang laki-laki dan 45 (Empat Puluh Lima) orang perempuan. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan ada 9 (Sembilan) orang S2, 26 (dua puluh enam) orang S1 Kesehatan, 6 (enam) orang D4, 36 (tiga puluh enam) orang D3, 17 (Tujuh Belas) orang SMA dan 16 (Enam Belas) orang SMP.

Bila dilihat dari kelembagaan berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan yang selanjutnya disebut BKK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Di dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan bahwa BKK terdiri dari Subbag ADUM, Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun ruang lingkup tugas masing-masing Subbag/Substansi di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1 Subbag ADUM mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan;
- 2 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 3 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BKK.
- 4 Koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 5 Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

B. Potensi dan Tantangan

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di pintu masuk negara dengan berpedoman pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. Dirjen Penanggulangan Penyakit menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan pada tingkat satuan kerja menjabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Manado sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025 -2029.

Potensi dan tantangan pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi input dalam menentukan rencana pelaksanaan program bidang Penanggulangan Penyakit Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Manado dalam upaya cegah tangkal faktor risiko kesehatan di Pintu Masuk Negara atau wilayah.

Tantangan yang tidak dapat diabaikan adalah dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, penyakit yang baru muncul (new emerging diseases). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new emerging diseases), Tantangan program Penanggulangan Penyakit di wilayah kerja BKK Kelas I Manado yaitu mobilitas pelaku perjalanan baik internasional maupun nasional, dimana Sulawesi Utara memiliki kawasan ekonomi pariwisata yang menjadi daya tarik pelaku perjalanan luar negeri, selain itu Bandara Internasional Sam Ratulangi menjadi salah satu bandara yang melayani charter flight untuk tenaga kerja asing di wilayah timur. Mobilitas domestik di Sulawesi Utara juga cukup tinggi terutama saat perayaan Natal dan Tahun Baru serta dibukanya kembali kegiatan nasional Tomohon International Flower Festival (TIFF) yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Manado dimana dapat mendeteksi, dan mencegah, faktor risiko di pintu masuk dan mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat, dan penyakit zoonosis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

BKK Kelas I Manado mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan diwilayah kerja pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas BKK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dibidang kekarantinaan kesehatan;
- g. Pengelolaan data dan informasi dibidang kekarantinaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi dan kerja sama dibidang kekarantinaan kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kekarantinaan kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi BKK.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJP-K 2005-2025, pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan melaksanakan berbagai macam cara dengan pelaksanaan transformasi kesehatan, di mana transformasi kesehatan ini di jabarkan dalam 6 pilar yakni, transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan dan teknologi kesehatan.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2024-2029 yaitu bersama indonesia maju menuju indonesia emas 2045. Terdapat delapan visi presiden, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

Selaras dengan visi Ditjen Penanggulangan Penyakit, Balai Kekejarantinaan Kesehatan menjabarkan visi Balai Kekejarantinaan Kesehatan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dibangun empat pilar yakni:

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Teknologi
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya program Ditjen Penanggulangan Penyakit telah menetapkan misi tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
3. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Balai Kekekarantinaan Kesehatan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BKK yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Data Manusia.

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan

6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen Penanggulangan Penyakit maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen Penanggulangan Penyakit pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Penanggulangan Penyakit, maka BKK telah menetapkan tujuan strategis BKK yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100%**.

C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen Penanggulangan Penyakit yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis BKK telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen Penanggulangan Penyakit yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2025. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalnya faktor risiko penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja BKK Kelas I Manado pada RAK awal tahun 2025-2029 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2025 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indicator revisi tahun 2022-2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator BKK Kelas I Manado Tahun 2020-2025

| No | Indikator Tahun 2020-2022 (semula) | Indikator Tahun 2022-2029 (revisi) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan | Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN |
| 2 | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan |
| 3 | Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara | Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara |
| 4 | Nilai kinerja anggaran | Nilai kinerja anggaran |
| 5 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| 6 | Kinerja implementasi WBK satker | Kinerja implementasi WBK satker |
| 7 | Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya |
| | | Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti. |
| | | Persentase realisasi anggaran |

Tahun 2025-2029, BKK Kelas I Manado telah menetapkan 9 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN

Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN harus dapat dikendalikan oleh BKK.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai kinerja anggaran

Nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran satuan kerja yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai kinerja anggaran satker diperoleh melalui aplikasi e-monev SMART DJA.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja BKK dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

8. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti.

9. Persentase Realisasi Anggaran

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen Penanggulangan Penyakit merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen Penanggulangan Penyakit yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

BKK Kelas I Manado telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program Penanggulangan Penyakit yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi. Arah atau strategi kebijakan BKK Kelas I Manado tersebut dapat dicapai melalui

1. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan rutin bagi petugas kesehatan karantina agar lebih terampil dalam pemeriksaan dokumen dan deteksi dini penyakit.
 - b. Rekrutmen tenaga kesehatan tambahan juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi lonjakan jumlah pelaku perjalanan.
 - c. Digitalisasi pemeriksaan dokumen kesehatan melalui aplikasi atau sistem verifikasi berbasis QR code dapat diterapkan untuk mengurangi pemeriksaan manual yang memakan waktu.
 - d. Pemasangan thermal scanner di area kedatangan dan penggunaan rapid test untuk penyakit menular tertentu.
 - e. Sosialisasi dan edukasi harus diperkuat melalui berbagai media, serta pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait prosedur karantina kesehatan. Kerja sama dengan maskapai, operator kapal, dan agen perjalanan juga perlu ditingkatkan agar setiap pelaku perjalanan telah mendapatkan informasi sebelum keberangkatan.
 - f. Memastikan ketersediaan stok vaksin dengan melakukan pemantauan dan koordinasi rutin dengan penyedia vaksin.
 - g. Memperkuat kemitraan dengan berbagai instansi terkait
 - h. Meningkatkan efektivitas penerbitan dokumen karantina kesehatan, mempercepat layanan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku perjalanan yang membutuhkan dokumen kesehatan dapat memperolehnya dengan mudah dan sesuai prosedur.
 - i. Menyediakan layanan konsultasi daring bagi calon pelaku perjalanan yang ingin mengetahui lebih awal apakah mereka memenuhi syarat kesehatan sebelum bepergian.
 - j. Mengadakan koordinasi berkala dengan otoritas bandara dan maskapai penerbangan untuk menyamakan pemahaman tentang kebijakan penerbitan surat tidak laik terbang.
 - k. Memperkuat koordinasi dengan maskapai penerbangan, operator pelabuhan, dan rumah sakit rujukan untuk mempercepat alur evakuasi pasien

- d. Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit Malaria hingga wilayah kerja (Indeks Anopheles < 1).
- e. Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit Diare (kecoa) hingga wilayah kerja (Index populasi kecoa < 2).
- f. Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit Diare (Lalat) hingga wilayah kerja (Index populasi lalat < 2).
- g. Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit DBD hingga wilayah kerja (House Index Perimeter = 0).
- h. Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan hingga wilayah kerja dalam rangka mencapai jumlah TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan.
- i. Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan hingga wilayah kerja dalam rangka mencapai jumlah TPP Laik Hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
- j. Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan hingga wilayah kerja dalam rangka mencapai jumlah lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali pemeriksaan bakteriologis.
- k. Peningkatan tindakan pengendalian alat angkut dan lingkungan berupa desinfeksi berkala dalam rangka pencegahan penularan penyakit menular di pintu masuk.
- l. Penguatan kapasitas SDM dalam penanganan KKM di Pintu masuk.
- m. Penguatan sarana prasarana dalam rangka menunjang kapasitas SDM di Pintu Masuk dalam upaya pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

- n. Dukungan peraturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas di pintu masuk dalam upaya pengendalian faktor risiko di pintu masuk.
- o. Komitmen bersama para pelaksana program pada seluruh wilayah kerja Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Manado dalam melaksanakan kinerja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi kelompok substansinya.
- p. Disiplin terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun dalam pelaksanaan kegiatan upaya pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

4. Nilai Kinerja Anggaran

Strategi yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Evaluasi Program

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penguatan jejaring dengan lintas program dan lintas sektor serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan dan evaluasi Program P2P melalui kegiatan antara lain: koordinasi / evaluasi pengelola program Wilayah Kerja ke Kantor Induk, Monitoring Evaluasi Pengelolaan Program ke Wilayah Kerja, mengikuti Pertemuan / Rapat koordinasi Teknis dan Evaluasi Program P2P Tingkat Pusat.

2) Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersusun dokumen RKAKL Satker melalui kegiatan penyusunan e-renggar, penyusunan RKAKL, pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran serta penyusunan RAK.

3) Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan baik melalui aplikasi SMART DJA, Monev Bappenas, Monev E-Performance, dan kompilasi laporan dalam bentuk Laporan Tahunan, Indikator Kinerja, Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja melalui kegiatan : penyusunan laporan pelaksanaan program,

penyusunan laporan e-monev penganggaran, penyusunan laporan e-monev Bappenas/P39 Tahun 2006, penyusunan laporan Tahunan satker, penyusunan laporan indikator RAK, penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja.

5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Upaya yang dilakukan mengukur kinerja pelaksanaan anggaran BKK Kelas I Manado dengan parameter Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi dan melakukan rapat anggaran setiap bulan antara Timkerja agar bisa menyesuaikan kegiatan dan anggaran yang ada setiap bulannya sedangkan untuk kegiatan yang memerlukan narasumber dari luar kantor dilakukan melalui daring/online dan ditambah dengan narasumber dari lintas program di daerah yang berkompeten

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

Meminta pendampingan oleh Itjen dan Eselon 1 pada tahun 2025 melalui daring/online serta peningkatan kapasitas pokja dalam proses perencanaan dan pelaporan pokja dan melakukan sharing session dengan BKK yang telah mendapatkan predikat WBK seperti BKK Semarang dan BKK Gorontalo.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pada indikator ini dengan cara saling mengingatkan antar pegawai dan melakukan sharing informasi terkait seminar, pelatihan dan workshop di group whatsapp BKK Manado.

8. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti.

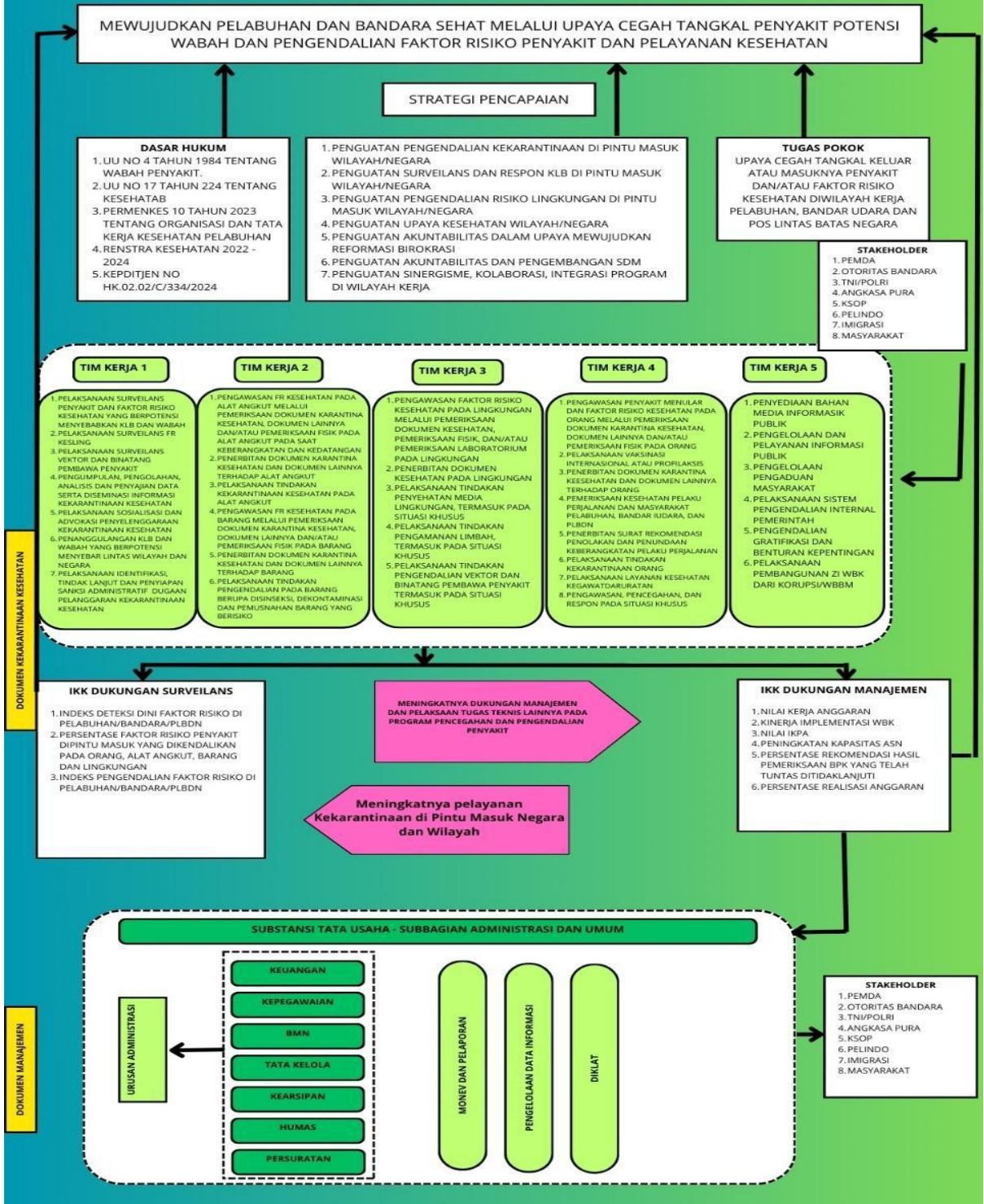
Melakukan koordinasi internal antara kepala kantor dan seluruh pegawai, rapat dengan seluruh pegawai. Koordinasi dengan tim yang sudah penunjukkan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

9. Persentase Realisasi Anggaran.

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan.

BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

PROSES BISNIS BKK KELAS I MANADO



B. Rencana Kegiatan

| No | Sasaran Kegiatan/Indikator Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN | | | | | | | |
| 1 | Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN | 1.646.860 | 1.915.806 | 0.8 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 2 | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, barang dan Lingkungan | 90% | 95% | 95% | 97% | 97% | 97% |
| 3 | Indeks pengendalian dipintu masuk | 85% | 90% | 95% | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | | | | | | |
| 4 | Nilai Kinerja Anggaran | 80% | 83 | 85 | 86 | 86 | 86 |
| 5 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 80% | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 6 | Kjnerja Implementasi WBK Satker | 70 | 72 | 75 | 76 | 93 | 93 |
| 7 | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya | 45% | 60 | 80% | 80% | 80% | 81% |
| 8 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti | - | - | 92.5% | 92.5% | - | - |
| 9 | Persentase realisasi anggaran | - | - | 95% | 95% | 96% | 96% |

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM RIBUAN) | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Indeks deteksi faktor risiko di Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 866.222.000 | 909.533.100 | 955.009.755 | 1.002.760.242 | 1.052.898.254 |
| 2 | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 815.202.000 | 855.962.100 | 898.760.205 | 943.698.215 | 990.883.125 |
| 3 | Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 144.482.000 | 151.706.100 | 159.291.405 | 167.255.975 | 175.618.773 |
| 4 | Nilai kinerja anggaran | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 229.444.000 | 240.916.200 | 252.962.010 | 265.610.110 | 278.890.615 |
| 5 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 131.026.000 | 137.577.300 | 144.456.165 | 151.678.973 | 159.262.921 |
| 6 | Kinerja implementasi WBK satker | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 169.724.000 | 178.210.200 | 187.120.710 | 196.476.745 | 206.300.582 |
| 7 | Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 479.888.000 | 503.882.400 | 529.076.520 | 555.530.346 | 583.306.863 |
| 9 | Persentase realisasi anggaran | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 15.263.341.000 | 16.026.508.050 | 16.827.833.452 | 17.669.225.124 | 18.552.713.380 |

Pelaksanaan kegiatan dalam indicator – indicator sebagai berikut:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan, terdiri dari kegiatan :
 - a. Pemeriksaan/penapisan orang meliputi : pemeriksaan /penampisan penumpang tiba dan berangkat, crew/abk tiba dan berangkat, situasi khusus (hari raya, event nasional- internasional dan TKA), Penumpang sakit, Laik terbang, ICV, pasien rujukan, surat keterangan berbadan sehat, Screening Tb dan Screening HIV, Vaksinasi.
 - b. Pemeriksaan alat angkut meliputi : pemeriksaan kesehatan/kekarantinaan alat angkut dibuktikan dengan dokumen kesehatan alat angkut berupa PHQC, GENDEC, Pemeriksaan sanitasi pesawat.
 - c. Pemeriksaan barang meliputi: pemeriksaan jenazah / Abu/ Kerangka
 - d. Pemeriksaan lingkungan meliputi: Pemeriksaan lingkungan bandara atau pelabuhan terkait pemeriksaan gedung / tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan, inspeksi sarana penyediaan air bersih dan rekapitulasi hasil survey vektor.
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, terdiri dari :
 - a. Faktor risiko yang dikendalikan pada orang yaitu:
 - Penumpang positif, ibu hamil >32 minggu
 - b. Faktor risiko yang dikendalikan pada barang yaitu:
 - Pengepakan yang tidak sesuai prosedur
 - c. Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut yaitu:
 - Ditemukan penumpang positif pada alat angkut dan desinfeksi alat angkut.
 - d. Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan yaitu:
 - Lokasi yang telah dikendalikan sampai memenuhi syarat.
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, terdiri dari:
 - a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%.
 - b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal < 1
 - c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva Anopheles
 - d. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoak < 2

- e. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2 f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0
 - g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer = 0
 - h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan i. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
 - j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis
4. Nilai Kinerja Anggaran, dinilai dari :
- a. Penyerapan anggaran.
 - b. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan c. Capaian keluaran
 - d. Efisiensi
5. Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Hal III DIPA
 - c. Penyerapan Anggaran d. Belanja Kontraktual
 - e. Penyelesaian Tagihan
 - f. Pengelolaan UP dan TUP
 - g. Dispensasi SPM
 - h. Capaian Output
6. Kinerja implementasi WBK satker, dinilai dari:
- a. Self Assesment
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL, terdiri dari kegiatan :
- a. Pendidikan
 - b. Pelatihan klasikal
 - c. Pelatihan non klasikal
8. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti.
9. Persentase Realisasi Anggaran.

D. Kerangka Kelembagaan

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MANADO



E. Kerangka Regulasi

1. Undang undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2025;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Keekarantinaan Kesehatan;

F. Kerangka Pendanaan

Tabel 2. Kerangka Pendanaan

| No | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan | Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah) | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 (pagu existing) | 2023 (pagu indikatif) | 2024 | 2025 |
| 1 | Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara | 880.901.000 | 2.729.812.000 | 1.574.572.000 | 1.600.000.000 | 1.725.000.000 | 866.222.000 |
| 2 | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, barang dan lingkungan | 220.245.000 | 449.701.000 | 314.484.000 | 340.000.000 | 400.000.000 | 815.202.000 |
| 3 | Indeks pengendalian dipintu masuk | 220.206.000 | 442.669.000 | 1.147.417.000 | 1.160.000.000 | 1.190.000.000 | 144.482.000 |
| 4 | Nilai Kinerja Anggaran | 5.064.754.000 | 203.624.000 | 15.763.809.000 | 24.700.000.000 | 19.000.000.000 | 229.444.000 |
| 5 | Nilai Indikator Kinerja Anggaran | 4.220.000.000 | 13.664.687.000 | 18.973.537.000 | 24.700.000.000 | 19.000.000.000 | 131.026.000 |
| 6 | Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker | 629.000 | - | 13.475.000 | 285.000.000 | 300.000.000 | 169.724.000 |
| 7 | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya | 844.125.000 | - | 159.780.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 479.888.000 |
| 8 | Persentase realisasi anggaran | | | | | | 15.263.341.000 |

Catatan: Distribusi pendanaan masing-masing substansi

| N O | INDIKATOR KINERJA | ALOKASI (DALAM RIBUAN) | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Indeks deteksi faktor risiko di Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN | 866.222.000 | 909.533.100 | 955.009.755 | 1.002.760.242 | 1.052.898.254 |
| 2 | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan | 815.202.000 | 855.962.100 | 898.760.205 | 943.698.215 | 990.883.125 |
| 3 | Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN | 144.482.000 | 151.706.100 | 159.291.405 | 167.255.975 | 175.618.773 |
| 4 | Nilai kinerja anggaran | 229.444.000 | 240.916.200 | 252.962.010 | 265.610.110 | 278.890.615 |
| 5 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 131.026.000 | 137.577.300 | 144.456.165 | 151.678.973 | 159.262.921 |
| 6 | Kinerja implementasi WBK satker | 169.724.000 | 178.210.200 | 187.120.710 | 196.476.745 | 206.300.582 |
| 7 | Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL | 479.888.000 | 503.882.400 | 529.076.520 | 555.530.346 | 583.306.863 |
| 9 | Persentase realisasi anggaran | 15.263.341.000 | 16.026.508.050 | 16.827.833.452 | 17.669.225.124 | 18.552.713.380 |

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pemantauan

Upaya pemantauan/monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program kegiatan tetap berjalan sesuai perencanaan dan juga memberikan informasi apabila terjadi hambatan serta masukkan untuk mencari solusi pemecahan masalah. Pemantauan dilakukan secara bertahap, harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan menggunakan aplikasi e-monev DJA, e-monev Bappenas, dan e-performance, OMSPAN, Simponi, SIMKA, Pcare Vaksinasi dan Sinkarkes.

B. Evaluasi

Upaya untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan atas pelaksanaan pemantauan capaian indikator kinerja secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). Dengan melibatkan lintas sektor, lintas program dibandara, pelabuhan dan wilayah untuk evaluasi eksternal, evaluasi internal melibatkan pemegang program setiap substansi dan kepala wilayah kerja.

Evaluasi juga dapat dilakukan dengan rekonsiliasi data yang ada aplikasi Simponi dan Sinkarkes untuk dokumen kesehatan, aplikasi Simponi dan aplikasi Saiba untuk rekonsiliasi realisasi penerimaan negara bukan pajak. Validasi data manual layanan vaksinasi Covid-19 dengan data input Pcare.

C. Pengendalian

Upaya pengendalian pelaksanaan program kegiatan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh kepala satker selaku kuasa pengguna anggaran dengan memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara bertahap, mengambil kebijakan upaya pemecahan masalah agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan dalam mencari solusi permasalahan adalah identifikasi masalah setiap substansi, menetapkan/merevisi SOP sebagai pedoman teknis pelaksanaan program.

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado Tahun 2020-2025 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Subbag, Substansi BKK Kelas I Manado mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi secara periodic selama 5 (lima) tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua substansi di lingkungan BKK Kelas I Manado oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Manado ini memberikan kontribusi dukungan manajemen dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pengendalian faktor risiko kesehatan di pintu masuk wilayah/negara khususnya dan Pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan, kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan
(dimasukkan semua indicator dari awal sampai revisi)

Tabel 3. Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan

| IKK | Target | | | | | | Anggaran | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------|-------|------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indeks deteksi dini factor risiko penyakit dipintu masuk negara | 1.646.860 | 1.915.806 | 0.8 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 880.901.000 | 2.729.812.000 | 2.148.819.000 | 2.217.044.000 | 892.934.000 | 866.222.000 |
| Persentase faktor risikopenyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, barang dan Lingkungan | 90% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 220.245.000 | 449.701.000 | 686.270.000 | 951.308.000 | 1.685.361.000 | 815.202.000 |
| Indek pengendalian dipintu masuk | 85% | 90% | 0.74 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 220.206.000 | 442.669.000 | 394.813.000 | 11.320.000 | 508.140.000 | 144.482.000 |
| Nilai Kinerja Anggaran | 80 | 83 | 85 | 86 | 86 | 86 | 5.064.754.000 | 203.624.000 | 355.533.000 | 542.598.000 | 520.358.000 | 229.444.000 |
| Nilai Indikator Kinerja Anggaran | 80% | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 4.220.000.000 | 2.729.812.000 | 11.216.986.000 | 10.769.863.000 | 11.716.066.000 | 131.026.000 |
| Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker | 70 | 72 | 75 | 76 | 76 | 76 | 629.000 | 449.701.000 | 4.176.299.000 | 7.045.347.000 | 7.045.372.000 | 169.724.000 |
| Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya | 45% | 60 | 80% | 80% | 80% | 80% | 844.125.000 | 442.669.000 | 14.991.000 | 423.716.000 | 851.412.000 | 479.888.000 |
| Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas ditindaklanjuti | - | - | - | 92,5% | 92,5% | - | - | 203.624.000 | - | - | - | - |
| Persentase realisasi anggaran | - | - | - | 95% | 96% | 96% | - | - | - | - | 1.966.068.000 | 15.263.341.000 |

| N O | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM RIBUAN) | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Indeks deteksi faktor risiko di Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 866.222.000 | 909.533.100 | 955.009.755 | 1.002.760.242 | 1.052.898.254 |
| 2 | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 815.202.000 | 855.962.100 | 898.760.205 | 943.698.215 | 990.883.125 |
| 3 | Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 144.482.000 | 151.706.100 | 159.291.405 | 167.255.975 | 175.618.773 |
| 4 | Nilai kinerja anggaran | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 229.444.000 | 240.916.200 | 252.962.010 | 265.610.110 | 278.890.615 |
| 5 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 131.026.000 | 137.577.300 | 144.456.165 | 151.678.973 | 159.262.921 |
| 6 | Kinerja implementasi WBK satker | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 169.724.000 | 178.210.200 | 187.120.710 | 196.476.745 | 206.300.582 |
| 7 | Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 479.888.000 | 503.882.400 | 529.076.520 | 555.530.346 | 583.306.863 |
| 9 | Persentase realisasi anggaran | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 15.263.341.000 | 16.026.508.050 | 16.827.833.452 | 17.669.225.124 | 18.552.713.380 |

Lampiran 3 Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

Tabel 4. Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

| Indikator | DO | Cara Perhitungan | Sumber Data |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara | Deteksi faktor risiko dipintu masuk negara/wilayah melalui pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan | Berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) dari nilai score maksimal dikurang score minimal | Laporan harian (jumlah penumpang, rekapan Gendec, COP,PHQC,dan ijin angkut jenazah) data kunjungan poliklinik, skrinning HIV/TB, situasi khusus, rujukan, laik terbang, ijin angkut orang sakit, vaksinasi/ICV, pemeriksaan awak kapal/crew pesawat (ICV personil kedatangan), pengawasan TTU, TPM, ISPAB dan rekapitulasi hasil vektor |
| Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, barang dan lingkungan | Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam 1 tahun | Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di bagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100% | Data faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan |
| Indek pengendalian dipintu masuk | Persentase faktor risiko kesehatan(KLB,Bencana, pengawasan sanitasi dan pengendalian vektor) dipintu masuk negara/wilayah | Berdasarkan nilai empiris score maksimal dikurang score minimal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data persentase SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam 2. Data persentase bandara/pelabuhan dengan indeks pinjal ≥ 1 3. Data persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (< 1) 4. Data persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2 5. Data persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2 |

| Indikator | DO | Cara Perhitungan | Sumber Data |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>6. Data persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0</p> <p>7. Data persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer <1</p> <p>8. Data persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan</p> <p>9. Data persentase lokus TPM laik Hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan.</p> <p>10. Data persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis</p> |
| Nilai Kinerja Anggaran | Capaian kinerja atas rangkaian proses penggunaan anggaran mencakup pengukuran, penilaian, dalam rangka peningkatan kinerja anggaran selama setahun. | Nilai kinerja yang didapat dari nilai perolehan E-Monev DJA | E-Monev DJA, E-Monev Bapenas, E-SMART, Aplikasi Sakti |
| Nilai Indikator Kinerja Anggaran | Indikator yang ditetapkan oleh kemenkeu untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja | Nilai kinerja yang didapat dari nilai perolehan Aplikasi OMSPAN | Aplikasi OMSPAN, E-Monev DJA, E-Monev Bapenas |
| Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker | Hasil assesment internal/eksternal terhadap kinerja implementasi WBK satker | Menggunakan lembar kerja elektronik dengan nilai minimal 75 | Laporan kegiatan setiap POKJA, WBK satker dalam setahun |
| Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya | ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya | Jumlah pegawai yang mendapatkan 20 JPL dibagi jumlah pegawai dikali 100% | Sertifikat, surat tugas, laporan |
| Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti | Persentase Hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dalam satu tahun anggaran, yang ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang. | Jumlah rekomendasi yang sudah tuntas ditindak lanjuti dibagi dengan rekomendasi temuan dikali 100. | Berita acara penyelesaian tindak lanjut LHP BPK. |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Persentase Realisasi Anggaran | Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan | Disajikan dengan basis kas | Kas atau setara kas yang diterima atau dibayarkan. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|

Lampiran 4 Matriks Strategi Pencapaian Program

Tabel 5. Matriks Strategi Pencapaian Program

| No | Sasaran Kegiatan | Kegiatan | Strategi | Lokus Kab/Kota) | Tahun (Timeline) | Kegiatan | Anggaran |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah | Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di pintu masuk negara | Meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara dan Pelabuhan serta lintas sektor dan lintas program | 1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | 2023 1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | Koordinasi LP/LS | DIPA BKK KELAS I MANADO |
| | | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, barang dan lingkungan | Meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara dan Pelabuhan serta lintas sektor dan lintas program | 1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado | 2023: 1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado | Koordinasi LP/LS | DIPA BKK KELAS I MANADO |

| No | Sasaran Kegiatan | Kegiatan | Strategi | Lokus Kab/Kota | Tahun (Timeline) | Kegiatan | Anggaran |
|----|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | | |
| | | Indek pengendalian dipintu masuk | Meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara dan Pelabuhan serta lintas sektor dan lintas program | 1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane | 2023 :1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore | Koordinasi LP/LS | DIPA BKK KELAS I MANADO |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Strategi | Lokus (Provinsi/ Kab/Kota) | Tahun Pelaksanaan (Timeline) | Kegiatan | Anggaran |
|----|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | 9. Wilker Pel.Laut Miangas | | |
| | | Nilai Kinerja Anggaran | Melaksanakan realisasi anggaran sesuai RPK dan RPD | 1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1.Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6.Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | 2023 :1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1.Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6.Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | Koordinasi internal (setiap substansi dan subbag adum) | DIPA BKK KELAS I MANADO |
| | | Nilai Indikator Kinerja Anggaran | Melaksanakan realisasi anggaran sesuai RPK dan RPD | 1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1.Wilker Pel.Laut Likupang | 2023 :1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1.Wilker Pel.Laut Likupang | Koordinasi internal (setiap substansi dan subbag adum) | DIPA BKK KELAS I MANADO |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Strategi | Lokus (Provinsi/ Kab/Kota) | Tahun Pelaksanaan (Timeline) | Kegiatan | Anggaran |
|----|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | | |
| | | Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker | Mengimplementasi kan kinerja dan inovasi WBK pada setiap pokja | 1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung | 2023 :1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane | Koordinasi antar pokja ,lintas sektor/lintas program dan Es-1 | DIPA BKK KELAS I MANADO |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Strategi | Lokus (Provinsi/ Kab/Kota) | Tahun Pelaksanaan (Timeline) | Kegiatan | Anggaran |
|----|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | | |
| | | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya | Melibatkan seluruh staf untuk mengikuti pelatihan minimal 20 JPL dalam setahun | 1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | 2023 :1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas | Koordinasi Internal | DIPA BKK KELAS I MANADO |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Strategi | Lokus (Provinsi/ Kab/Kota) | Tahun Pelaksanaan (| Kegiatan | Anggaran |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | Persentase rekomendasi pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti | Koordinasi dengan eselon 1 dan itjen Kemenkes | BKK Kelas I Manado | 2023 | Koordinasi dan Konsultasi | DIPA BKK KELAS I MANADO |
| | | Persentase Realisasi Anggaran | Konsistensi RPK-RPD secara periodik dalam satu tahun.. | BKK Kelas I Manado | 2023 | Monev DJA, Monev Sakti, Monev SMART | DIPA BKK KELAS I MANADO |